

SKRIPSI
PENGARUH POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT AMPHIBI
DALAM MEMENANGKAN PASANGAN CALON AHYAR-MORI PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH NTB 2018

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENGARUH POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT AMPHIBI DALAM
MEMENANGKAN PASANGAN CALON AHYAR-MORI PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH NTB 2018



Disusun dan diajukan oleh:

ABD. HAYYI
NIM.21513A0030

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Mataram, 30 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dedv Iswanti, S.T., M.M
NIDN. 0825118501


Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. -0816057902

Mengetahui.

Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan




Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PERNGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT AMPHIBI DALAM
MEMENANGKAN PASANGAN CALON AHYAR-MORI PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH NTB 2018



Disusun dan diajukan oleh

ABD. HAYYI
NIM.21513A0030

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 7 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| • <u>Dedy Iswanto, S.T., M.M</u>
NIDN. 0825118501 | Ketua (.....) |
| • <u>AyatullahHadi, S.IP., M.IP</u>
NIDN. -0816057902 | Anggota 1 (.....) |
| • <u>Drs. Amil, M.M</u>
NIDN.0831126204 | Anggota II (.....) |

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Drs. Amil, M.M
NIDN.0831126204

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Abd. Hayyi

Nim : 21513A0030

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lain).
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 7 Agustus 2019



Abd. Hayyi
ABD. HAYYI
NIM : 21513A0030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Manusia Yang Terbaik Adalah Manusia yang Bermanfaat
Bagi Sesamanya*

*Perkecilah dirimu, maka engkau akan tumbuh lebih besar
dari pada dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan
terungkap tanpa kata-kata.
(Maulana Jalaluddin Rumi)*



PERSEMBAHAN

*Dengan hati yang dipenuhi cinta dan ketulusan, ku
persembahkan kepada kedua orang tua ku :*

AYAHANDA AHMAD TURMUZI

DAN

IBUNDA BQ. SUMAINI

*SERTA KU DEDIKASIKAN UNTUK
KEBERLANGSUNGAN ILMU PENGETAHUAN*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Politik Organisasi Masyarakat Amphibi Dalam Memenangkan Pasangan calon Ahyar-Mori Pada Pemilihan Kepala Daerah NTB 2018”** dengan lancar dan tepat waktu.

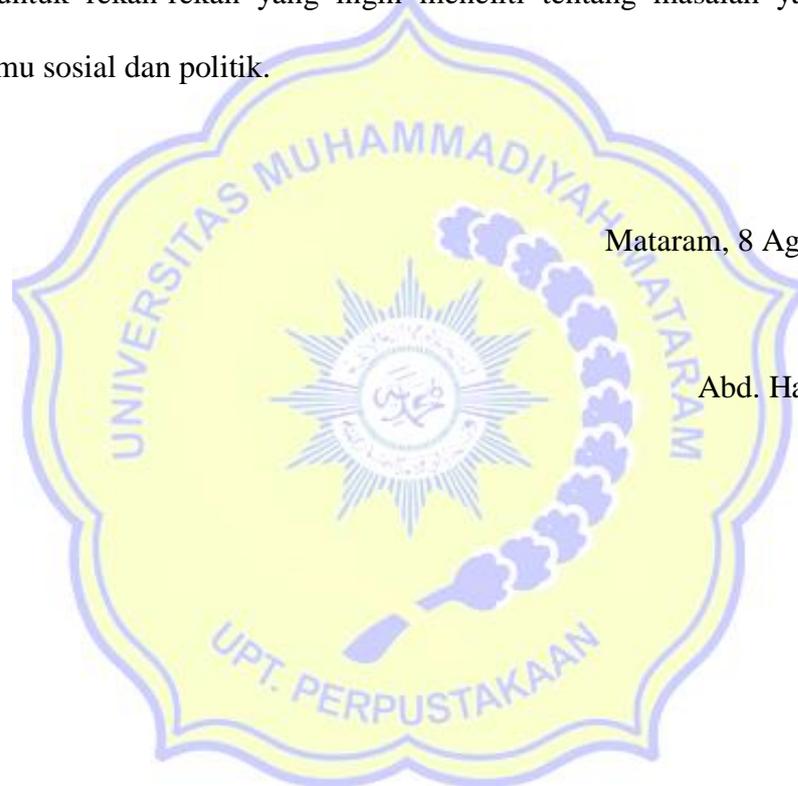
Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penyusun ingin sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dedi Iswanto S.T MM selaku Dosen Pembimbing Utama
2. Bapak Ayatullah Hadi S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, *support*, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Untuk kedua orang tua saya, Ahmad Turmuzi dan Bq. Sumaini. Terima Kasih untuk segalanya. Semoga Tuhan Meridhai apa yang telah kalian lakukan dan perjuangkan untuk ku.
4. Untuk seseorang yang teramat spesial, Dewi Armita Maulidiani. Kita adalah dua kata yang bertemu dalam puisi. ku sederhanakan saja dengan ucapan Terima Kasih.
5. Untuk teman-teman sekomplotan ku, Jodi Agustin Kusuma, Lalu Nanang Alwi, Lalu Reza Fahlevi, Muhammad Rudi Hadi, Samsul Hadi, Guntur Merdika Hadi dan Lalu Eka Putra. Terima Kasih atas inspirasi dari secangkir kopi dan asap kretek.

6. Untuk semeton-semeton ku di Formasi Pakar Ummat, Terima Kasih, kalian adalah keluargaku, yang terlahir dari rahim bumi Patuh Karya.

7. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan berikutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini memiliki manfaat untuk rekan-rekan yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan ilmu sosial dan politik.



Mataram, 8 Agustus 2019

Abd. Hayyi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I : Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Manfaat Akademik	6
1.6 Manfaat Praktis	6
1.7 Manfaat Teoritis	6
BAB II : Tinjauan Pustaka	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Teori Kekuatan Poitik	12
2.2.2 Pengertian Kekuatan Politik	12
2.2.3 Konsep Kekuatan Politik.....	14

2.3 Organisasi Masyarakat	14
2.3.1 Pengertian Organisasi Masyarakat.....	14
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat	15
2.4 Pengaruh Politik Ormas Sebagai Kelompok Kepentingan.....	17
2.4.1 Definisi Kelompok Kepentingan	17
2.4.2 Jenis Kelompok Kepentingan	20
2.4.3 Peran Kelompok Kepentingan	22
2.4.4 Pertumbuhan dan Perkembangan Kelompok Kepentingan	24
2.4.5 Tujuan Dan Cara Mempengaruhi Pemerintah	26
2.4.6 Kedudukan Dalam Sistem Politik	28
2.4.7 Model dan Pola Kelompok Kepentingan	30
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	32
2.6 Definisi Konseptual	32
2.7 Definisi Oprasional	35

BAB III : Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Sumber Data	37
3.4 Pemilihan Narasumber	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknis Analisis Data	41

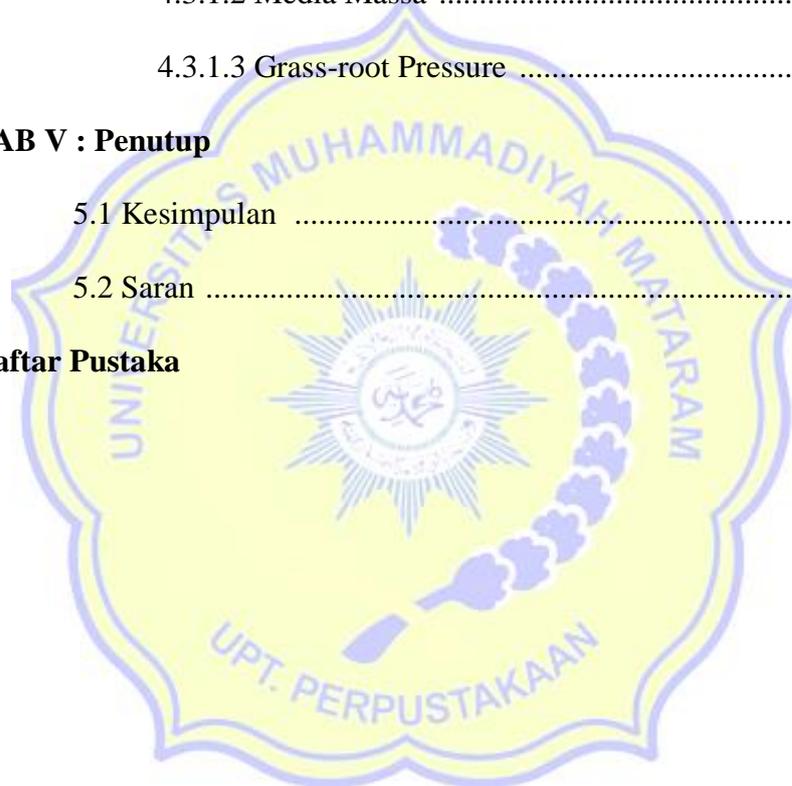
BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Sejarah Ormas Amphibi	44
4.2 AD/ART Ormas Amphibi	47
4.3 Pembahasan	58
4.3.1 Kekuatan Politik Ormas Amphibi	58
4.3.1.1 Lobbying	58
4.3.1.2 Media Massa	63
4.3.1.3 Grass-root Pressure	67

BAB V : Penutup

5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72

Daftar Pustaka



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Daftar Responden Penelitian	38
Tabel 4.1 Penyebaran Anggota Ormas Amphibi	47
Tabel 4.2 Partai Koalisi Ahyar-Mori	62
Tabel 4.3 Pemberitaan Media Massa Atas Dukungan Amphibi	65
Tabel 4.4 Pola Dukungan Massa Amphibi	69



**PENGARUH POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT AMPHIBI
DALAM MEMENANGKAN PASANGAN CALON AHYAR-MORI PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH NTB 2018**

ABD. HAYYI

ABSTRAK

Berbagai fenomena yang terjadi di dalam proses pemilihan Gubernur NTB seperti dukungan dari berbagai LSM dan Ormas di setiap kandidat untuk mengukung Jagoannya untuk menjadi Gubernur NTB. Begitu banyak Ormas-ormas yang ikut berperan serta dalam Pesta Demokrasi. Ormas-ormas menjadi kekuatan politik non partai yang memiliki kekuatan untuk memobilisasi masa sehingga ormas-ormas tersebut mampu menjadi kelompok pemenangan yang kuat dari para kandidat yang berkontestasi.

Penelitian ini menggunakan teori kekuatan politik (Gabriel Almond 1980), teori konsep kekuatan politik (Hays 2011) dan teori kelompok kepentingan (Janda, Berry, dan Goldman 1997) sebagai analisis peneliti, karena organisasi masyarakat Amphibi merupakan kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan-kekuatan politik dalam kontestasi pilkada NTB 2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Kesimpulan penelitian ini adalah ormas Amphibi yang merupakan kelompok kepentingan memiliki pengaruh politik dalam memenangkan paslon Ahyar-Mori pada pilkada NTB 2018 yakni, kekuatan lobbying, kekuatan media massa dalam penyampaian isu dan pesan-pesan politik tertentu dan kekuatan grass-root pressure untuk menggalang dukungan masyarakat akar rumput.

Kata Kunci : Pilkada, Organisasi Masyarakat, Pengaruh Politik

THE POLITICAL INFLUENCE OF THE AMPHIBI ORGANIZATION COMMUNITY IN WINNING THE AHYAR-MORI CANDIDATE PAIR IN THE 2018 NTB REGIONAL ELECTION

ABD. HAYYI

ABSTRACT

Various phenomena that occur in the NTB Governor's election process such as support from various community organizations in each candidate to carry his champion to become the Governor of NTB. So many community organizations have participated in democratic parties. Community organizations become non-party political forces that have the power to mobilize the masses, so that community organizations are able to become strong winning groups of contesting candidates.

The study uses the theory of political power (Gabriel Almond 1980), the theory of the concept of political power (Hays 2011), and the theory of interest groups (Janda, Barryn and Goldman 1997) as research's analysis. Because the Amphibi community organization is an interest group that has political strength in the 2018 NTB regional elections.

This research uses a qualitative approach method. Descriptive analysis method is used to get a systematic, factual and accurate picture of the facts, the properties and the relationship between the phenomena under investigation. Descriptive analysis method is a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are.

The conclusion of this research is the Amphibi community organization which is an interest group has political influence in winning the candidate pair Ahyar-Mori in the NTB 2018 regional election namely, the power of lobbying, the power of mass media in delivering certain political issues and messages and the power of grass-root pressure to garner grass-root community support.

Key Words : Regional election, Community Organizations, Political Influence

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (selanjutnya: Pilkada) secara langsung merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia disamping pemilu Legislatif dan pemilu Presiden. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat dipandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu sistem pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di daerah yaitu sebuah sistem pemerintahan yang tidak lagi sentralistis.

Harahap dalam Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada (2005:103) mengatakan bahwa demokrasi adalah proses menuju peradaban yang baik. Oleh karena itu membangun demokrasi berarti membangun peradaban itu sendiri.

Pada dewasa ini demokrasi menjadi populer dan hampir diterima secara universal karena dianggap sebagai sistem politik yang baik dalam memajukan kemanusiaan. Demokrasi atau pemerintahan demokrasi berkaitan erat dengan faktor yang umum di kenal saat ini seperti adanya sistem perwakilan, adanya pemilihan secara berkala, adanya keterbukaan dan pengawasan sosial (*social control*) dari rakyat atau masyarakat. Demokrasi juga dapat dikatakan sebagai “pemerintahan dari bawah”, pemerintah yang di kendalikan oleh rakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun yang di maksud dengan bawah disini adalah rakyat yang dalam hal ini adalah

sebagian besar atau mayoritas mempunyai suara untuk ikut menentukan serta mempengaruhi proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang di sediakan untuk itu pada peringkat infrastruktur politik.

Pilkada juga dilaksanakan sebagai upaya mendemokratisasikan kehidupan berbangsa-bernegara di tingkat lokal. Penumbuhan demokrasi tingkat lokal ini, merupakan ikhtiar untuk mencari pemimpin lokal yang memiliki legitimasi kuat, demokratis dan refresentatif. Sebuah pengalaman berdemokrasi yang jika dilihat dari pluralitas dari negara Indonesia yang tampak merupakan pesta demokrasi yang sarat beban.

Selain itu, Pilkada merupakan sarana kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan politik lokal, untuk meningkatkan partisipasi politik tingkat daerah, legitimasi politik dapat memberikan dampak ikatan yang kuat terhadap kepemimpinan daerah terpilih, pilkada sebagai ruang untuk kompetisi secara adil anatar calon yang bersaing melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih optimal. Baik secara tahapan berlangsungnya pemilihan hingga proses politik pasca pemilihan

Kenyataannya tidak semata-mata calon gubernur dan wakil gubernur hanya mengandalkan proses pemilihan secara struktural seperti kampanye-kampanye yang dilakukan. Para calon tersebut juga mengandalkan mobilisasi politik untuk kepentingan pemilihan. Tidak hanya melalui atau menggunakan partai politik namun juga melalui instrumen mobilisasi politik non partai.

Pada pilkada 2018 di Nusa Tenggara Barat (NTB) lalu tak sedikit para kandidat yang berkontestasi menggunakan kekuatan mobilisasi Organisasi

Kemasyarakatan (selanjutnya : Ormas). Ormas merupakan kelompok orang yang secara organisatoris membentuk suatu perkumpulan secara formal yang di atur berdasarkan ketentuan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam bidang social budaya.

Yang termasuk dalam kategori ormas biasanya meliputi organisasi ekonomi dengan tujuan memperoleh kesejahteraan bagi kelompok anggotanya, organisasi keagamaan, dan organisasi social lainnya. kendati ormas tidak melibatkan dirinya dalam proses politik, tetapi ormas tetap dikategorikan sebagai salah satu kekuatan politik dan merupakan salah satu bagian dari subsistem politik (Setiadi dan Kolip , 2001 : 41-42)

Pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 lalu, berbagai nama ormas mulai bermunculan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya adalah ormas AMPHIBI yang berpusat di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, yang kemudian menjadi objek dalam penelitian ini. Adanya relasi atau hubungan yang terjalin antara pengurus ataupun anggota organisasi masyarakat dengan elit yang ada didalam pemerintahan akan memunculkan sebuah hubungan yang menyebabkan organisasi masyarakat tidak berjalan sesuai dengan visi misi yang menjadi dasar terbentuknya organisasi masyarakat tersebut.

Berbagai fenomena yang terjadi didalam proses pemilihan Gubernur NTB seperti dukungan dari berbagai LSM dan Ormas disetiap kandidat untuk mengusung “Jagoannya” untuk menjadi Gubernur NTB. Begitu banyak Ormas-ormas yang ikut berperan serta dalam “Pesta Demokrasi”. Sebut saja beberapa

Ormas yang menjadi kekuatan politik non partai seperti Nahdatul Wathan yang mengusung pasangan Zul-Rohmi, YATOFA yang memngusung pasangan Suhaili-Amin, dan AMPHIBI yang turut langsung mengusung dan bertekad memenangkan pasangan Ahyar-Mori dalam kontestasi Pilkada 2018.

Ormas tidak bisa lepas dari seorang tokoh sentral atau tokoh informal yang menjadi salah satu kekuatan politik untuk memenangkan sebuah kontestasi politik. Tokoh informal ini tentu saja sudah memiliki track record yang mumpuni, sehingga mampu menghegemoni masyarakat. Tokoh-tokoh informal yang sekaligus menjadi pendiri ataupun seorang ketua dari Ormas menciptakan pengaruhnya melalui gerakan-gerakan sosial seperti bidang pemberdayaan, bidang keamanan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan lain-lain.

Setelah melakukan pertimbangan, Ormas Amphibi berafiliasi sekaligus berkomitmen memenangkan Pasangan Ahyar-Mori pada Pilgub 2018 lalu. Salah satu alasan Ormas Amphibi berafiliasi pada pasangan Ahyar-Mori adalah adanya hubungan atau ikatan emosional yang kental antara dewan pendiri Ormas Amphibi dengan ayahanda dari Ahyar Abduh yang sampai saat ini hubungan tersebut tetap dirawat dan dijaga dengan baik. Adapun kekuatan politik yang dimiliki oleh Ormas Amphibi adalah, *Pertama* kekuatan Tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, dan budaya. Tokoh-tokoh informal ini di harapkan mampu menjadi strategi jitu untuk mendulang suara dalam kontestasi pemilukada. *Kedua* kekuatan kesejarahan atau secara historis yang masih melekat dengan kultur masyarakat bahkan menjadi doktriner sebagian masyarakat yang tersebar di Kabupaten

Lombok Timur (Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra dan Sikur), Kabupaten Lombok Tengah (mayoritas desa-desa di Kecamatan Praya Timur) maupun Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Sekotong dan sekitarnya). Ormas AMPHIBI mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon Gubernur Ahyar-Mori kurang lebih satu bulan menjelang pemilihan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan meneliti sekaligus membahas kiprah ormas Amphibi dalam kontestasi pilkada NTB 2018 lalu dengan Judul, “Kekuatan Politik Ormas Amphibi dalam Memenangkan Paslon Ahyar-Mori pada Pilkada NTB 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan politik Ormas AMPHIBI untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) Ahyar-Mori pada kontestasi pemilihan kepala daerah NTB 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan politik Ormas AMPHIBI untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) Ahyar-Mori pada kontestasi pemilihan kepala daerah NTB 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat di gunakan untuk beberapa kepentingan, Yaitu :

1.5 Manfaat Akademik

- a. Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

1.6 Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah, partai-partai politik, maupun ormas-ormas dalam melakukan analisa kekuatan politik.
- b. Menjadi bahan pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang peta kekuatan politik dan analisa dinamika internal pada Organisasi Masyarakat.

1.7 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber data atau informasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian Kekuatan Politik Ormas Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu politik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin kesahihan dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut dalam usaha penelusuran yang dilakukan peneliti mendapatkan dan menemukan beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, sekaligus mencari objek kajian penting dari penelitian yang lainnya. Penelitian-penelitian tersebut antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul/Tahun	Peneliti	Kesimpulan
1	<i>“Eksistensi Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah studi kasus Eksistensi Organisasi Masyarakat Laskar Bali Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013</i>	Putu Indah Prameswari	Laskar Bali yang bergerak dalam bidang sosial dan keamanan berperan besar dalam memenangkan Mangku Pastika di Pilgub Bali 2013. Terlihat pada peran-perannya, seperti : pengamanan suara Mangku Pastika, menjadi saksi di setiap TPS dan lain-lain. Dalam keterlibatannya tersebut, kepentingan yang di miliki Laskar Bali dalam keterlibatannya terhadap pemenangan Mangku Pastika berawal dari hubungan yang terjalin antara sekjen Laskar Bali dan Mangku Pastika tersebut dapat

			<p>mempermudah Laskar Bali dalam merealisasikan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam organisasi. Dalam jurnal tersebut terdapat persamaan peneliti menemukan kesamaan dalam hal yang diteliti yakni tentang Organisasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah, namun peneliti lebih memfokuskan kepada kekuatan politik Organisasi Masyarakat dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.</p>
2.	<p><i>“ Organisasi Kemasyarakatan Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia” Tahun 2015</i></p>	<p>Satrya Pangandaran Marpaung</p>	<p>berkesimpulan bahwa kedudukan ormas di indonesia tidak terlepas dari sejarah pergerakan Ormas. Tidak dapat dipungkiri dan masih dapat dilihat secara nyata bahwa organisasi masyarakat yang tumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan masih terus tumbuh yang secara konsisten membaktikan diri dalam bidang sosial, politik, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas</p>

			kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang.
3.	<p><i>“Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dalam partai politik di Kecamatan Sukawati” Tahun 2014</i></p>	I Wayan Putra Widia Sukma	<p>berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa garis besar sebagai suatu bentuk kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :</p> <p>Dewasa ini organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai perusahaan atau usaha yang menjanjikan, khususnya bagi anggota partai politik atau partainya untuk memperoleh suatu dukungan dan membantu aktifitas partai politik meskipun organisasi kemasyarakatan bukan sayap dari partai politik Aktifitas organisasi kemasyarakatan (Ormas) sudah menunjukkan beberapa kegiatan yang mengarah pada kegiatan sosial dan melibatkan beberapa anggota organisasi kemasyarakatan yang ada, akan tetapi aktifitas lainnya masih terlihatnya organisasi kemasyarakatan ikut serta dalam kegiatan partai politik.</p>

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Kekuatan Politik

Menurut Gabriel A. Almond (19880), “kekuatan” dan “kekuasaan” sering di pakai dalam arti yang sama, namun sebagian besar analis menganggap kekuasaan sebagai konsepsi yang lebih luas dan melihat kekuatan sebagai suatu bentuk kekuasaan yang lebih dalam dengan berbagai aspek yang mendukungnya

Selanjutnya definisi dari kata “politik” menimbulkan beraneka ragam akan definisinya. kata politik berasal dari Yunani “polis” adalah kota yang bersetatus Negara/Negara kota. seperti yang di kemukakan oleh Arifin Rahman bahwa politik adalah segala aktifitas yang di jalankan oleh Polis untuk kelestarian dan perkembangannya di sebut “politeke techne”/politika (Rahman Arifin, Sistem Politik Indonesia : Dalam Persepektif Struktural Fungsional, Surabaya, 2002).

Sedangkan pengertian politik menurut Miriam Budiardjo adalah segala aktifitas yang dilakukan dalam suatu system politik atau Negara yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan-tujuan dari system itu, disamping bagaimana cara mewujudkan tujuan-tujuan tersebut (Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia, 2002. Hal 3).

Mengamati suatu tindakan yang sifatnya politis, maka harus mencakup proses dimana sekelompok manusia menggunakan kekuatan atas orang lain atau berusaha agar ideologinya berlaku pula atas orang lain itu. Selain itu ada pula ungkapan menyatakan : politik adalah perjuangan

mengangkat penguasa yang berfungsi menetapkan kebijaksanaan pemerintah. walau arti ini telah menunjukkan arti yang berbeda antara aktifitas politik dan non politik, tetapi belum menyentuh sasaran secara tuntas kegiatan-kegiatan yang non pemerintahan

Tingkat kesatuan politik yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat pada hakikatnya mencerminkan kaitan antara lembaga politik dan kekuatan-kekuatan social yang membentuknya. kekuatan social adalah kelompok etnis, keagamaan, tentorial, ekonomis atau status. Pada dasarnya modernisasi melibatkan peningkatan jumlah dan keanekaragaman kekuatan social di dalam masyarakat. tetapi suatu organisasi politik ialah suatu sarana peraturan untuk mempertahankan kekuasaan, menyelesaikan perselisihan, memilih tokoh-tokoh pemimpin yang memiliki wibawa.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan akan arti dari kekuatan politik adalah suatu komunitas atau kelompok (organisasi) baik formal maupun non formal yang mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik.

2.2.2 Konsep Kekuatan Politik

Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalism (Hays 2011:122)

Teroti kekuatan politik yang kemudian mendukung saya dalam menjabarkan lebih jauh mengenai kekuatan politik Organisasi Masyarakat Amphibi dalam memenangkan paslon Ahyar-Mori dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah NTB tahun 2018.

Kekuatan-kekuatan politik yang dimaksud adalah bertitik tolak dari analisis sistem politik (teori struktur-fungsi) yang di kemukakan oleh Gabriel A. Alomond (1980), bahwa dalam sistem politik, terdapat struktur-struktur politik atau lembaga-lembaga politik yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu demi berjalannya proses politik.

Teori ini bertitik tolak dari asumsi dasar, bahwa dalam sistem politik terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi kelangsungan hidup sistem politik itu sendiri. Fungsi-fungsi yang dimaksud dalam sistem politik adalah input dan fungsi output, studi ini memusatkan pada perhatian pada fungsi input yang terdapat di dalam struktur politik (infrastruktur politik) seperti misalnya partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan lain-lain (Loomis 2011 :184)

Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan (Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol, 15, 2016)

Kekuatan-kekuatan politik suatu negara berbeda dengan kekuatan politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang di gunakan. Teori kekuatan politik terbagi menjadi dua teori yaitu, teori kekuatan *Patriachaal* dan *Patrimonial*, yaitu adanya kelompok yang berkedudukan yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, di dalam teori kekuatan politik *Patrihal* menunjukkan bahwa pemerintah dalam suatu daerah merupakan orang yang kuat dalam arti berpengaruh karena berjasa dalam sikap bagi semua warganya.

Sedangkan teori kekuatan *Patrimonial* adalah berdasarkan kepemilikan, bahwasanya seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan yang akan menduduki kekuasaan. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, materi maupun politik (Jurnal Roy Natsir, Kekuatan Politik Dany Lovato dan Syamsul Rizal Dalam Pemilihan Walikota Makassar, 2013).

a. Fungsi Kekuatan Politik

Proses kekuatan politik dapat berlangsung dengan baik, dapat dipahami jika kita melihat dari persepektif teoritis sistem politik suatu negara yakni dengan cara melakukan pendekatan struktural fungsional. Bertitik tolak dari asumsi dasar, bahwa dalam sistem politik terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi kelangsungan kekuatan politik itu sendiri. Fungsi-fungsi yang dimaksudkan dalam sistem politik itu adalah fungsi *input* dan fungsi *output*. (Bendit 1975 :32).

b. Jenis Kekuatan Politik

Pada dasarnya, banyak aspek potensial tertransformasikannya menjadi kekuatan menjadi kekuatan politik sebagaimana yang dikatakan oleh Bachiar Effendy (1993 :241) yakni :

- 1) Kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik dan militer.
- 2) Kekuatan-kekuatan politik yang non formal adalah merupakan bagian dari bangunan civil society, dalam hal ini dapat dimasukkan : dunia usaha, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pemimpin agama, kalangan intelektual, lembaga-lembaga dan media massa.

2.3 Organisasi Masyarakat

2.3.1 Pengertian Organisasi Masyarakat

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, khendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan).

Organisasi masyarakat merupakan organisasi sosial. Ormas memiliki latar belakang dan atau ciri tertentu sebagai identitasnya, misalnya suku, etnis, agama atau identitas lainnya. Organisasi tersebut juga dibangun atas

tujuan-tujuan tertentu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kepentingan-kepentingan organisasi. Dengan adanya identitas dan kepentingan ini, anggota-anggota didalamnya kemudian menginternalisasi dan menjalankan nilai-nilai yang berlaku bagi kelompoknya, sehingga mereka atau orang-orang di luar kelompok akan memahami anggota-anggota tersebut sebagai sebuah organisasi sosial (Gatot Eddy Pramono 2015:5 *Jurnal Keamanan Nasional* , Vol 1).

Surabakti (2007) menjelaskan bahwa makna dari eksistensi ormas tertuju kepada basis pergerakan kelompok kepentingan pada era sekarang ini. Kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, kepercayaan dan tujuan, yang memiliki kesepakatan bersama untuk mengorganisasikan diri dalam melindungi dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Etrhidge dan Hendelman dalam buku dasar-dasar Ilmu Politik (Miriam Budiardjo 2008:67) dijelaskan bahwa kelompok kepentingan merupakan organisasi yang bertujuan untuk melakukan proses mempengaruhi kebijakan publik yang dianggap penting bagi anggota-anggota organisasi didalamnya.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat memiliki tujuan dan fungsi masing-masing, namun secara khusus harus bersama-sama mencapai tujuan nasional. Mengingat ormas sangat beragam, maka tujuan dan fungsi ormas sebagai berikut :

a. Tujuan Organisasi Masyarakat

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
8. Mewujudkan tujuan negara.

b. Fungsi Organisasi Masyarakat

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa

7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Skripsi Novrizal Fami, Analisis Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial, tahun 2018).

2.4 Pengaruh Politik Organisasi Masyarakat Sebagai Kelompok Kepentingan (*Intereset Group*)

2.4.1 Definisi Kelompok Kepentingan

Secara sederhana, kelompok kepentingan merupakan suatu kumpulan individu-individu ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan yang dapat dipertahankan demi terciptanya kelangsungan hidup setiap warga negara, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun negara dalam rangka mencapai dan dan mempertahankan sebuah kepentingan, tentu saja memerlukan sebuah usaha, kerja keras, dan sebuah perjuangan yang semuanya saling bersentuhan antar individu atau masyarakat. Untuk itu semua sangat diperlukan kekuatan dan motivasi maupun dukungan dari berbagai pihak sehingga diperoleh tanggapan yang baik dari masyarakat dan kelompok atau pihak-pihak tertentu menjadi tujuan dari sebuah kepentingan.

Organisasi yang terbentuk dari dan mengupayakan mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi kepentingan merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non Government Organisation (NGO), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), dan

organisasi sosial lainnya. Hal ini di latar belakang oleh lahirnya kelompok kepentingan ini adalah adanya dominasi individu masyarakat, negara, maupun negara lain, baik yang telah berkembang maupun yang terbelakang dapat membahayakan kelangsungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum kelompok kepentingan hampir sama dengan sebuah partai politik, yang sama merupakan sebuah katalisator penghubung antara pemerintah dan yang di perintah.

Kelompok kepentingan lebih kepada sekelompok individu yang mengadakan suatu persekutuan yang didorong oleh sebuah kepentingan-kepentingan yang dapat mempengaruhi suatu kelompok tertentu. Kepentingan dapat berupa kepentingan umum, masyarakat luas dan sekelompok kepentingan tertentu (Jurnal Arfan Ashari Saputra, Kelompok Kepentingan dan Gerakan Sosail Baru dalam Proses Kebijakan Politik, Magister Ilmu Pemerintahan, UMY).

Kelompok kepentngan seringkali di definisikan sebagai, *a group of persons who share a common cause, wich puts then into political competation with orther groups of interest* (Bendit 1975:34). Pada definisi tersebut, kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintah (Janda, Berry,dan Goldman 1997).

Kelompok kepentingan seringkali dikonotasikan secara negatif oleh kalangan awam yang sering mengasosiasikan kelompok kepentingan dengan oligarki dalam politik. Definisi kelompok kepentingan (interest group) sendiri ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik dan kelompok penekan.

Kelompok kepentingan pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua, *pertama* kelompok kepentingan privat ; dan *kedua* kelompok kepentingan publik. Kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan anggota-anggota yang diwakilinya (golongan tertentu) dalam konteks kehidupan umum seperti, pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, termasuk para pekerja dan buruh.

Sementara kelompok kepentingan yang bersifat publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang anggotanya. Contohnya dari kelompok kepentingan ini adalah gerakan-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan, pertambangan, keamanan, perempuan, korupsi dan sebagainya (Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, vol. 15, No 2, April 2016)

2.4.2 Jenis Kelompok Kepentingan

Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis kelompok kepentingan, antara lain :

a. Kelompok anomik

Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk diantara unsur-unsur masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering tumpang tindih dengan bentuk-bentuk partisipasi non-konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan dan lain-lain.

b. Kelompok Non-asosional

Seperti kelompok anomik, kelompok ini jarang sekali yang terorganisasi secara rapi. Selain itu kegiatannya juga tidak begitu intens hanya kadangkala. Wujud dari kelompok ini adalah kelompok-kelompok keluarga atau keturunan etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, kepala keluarga atau pemimpin agama.

c. Kelompok institusional

Kelompok ini sifatnya formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain. Karena itu, organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, birokrasi dan ormas-ormas keagamaan seringkali mendukung kelompok ini atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan

lobi. Sebagai kelompok formal, kelompok ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat.

d. Kelompok Asosional.

Kelompok asosional meliputi serikat buruh, kamar dagang, atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik dan lain-lain. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staf profesional yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur .

Sebagai sebuah perkumpulan, individu mengadakan sebuah persekutuan yang didorong oleh kepentingan tertentu, yang di mana berupa kepentingan secara umum dan kepentingan secara kelompok tertentu. Menurut (Heywood 2013) kelompok dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam :

- a. Kelompok komunal, yang lebih menekankan pada kelompok kepentingan konvensional dimana anggotanya secara sadar dan peduli untuk menjadi bagian dari struktural kelompok.
- b. Kelompok institusional, mengarah pada bagian dari sebuah mesin pemerintahan, sehingga dari mesin tersebut terdapat pada kelompok kepentingan dimana mereka tidak memiliki otonomi secara mutlak.
- c. Kelompok asosional, lebih mengacu pada masyarakat yang dibentuk menjadi suatu elemen demi mencapai satu tujuan

mereka, sehingga lebih mengarah pada ekspresi dan esensi dari sebuah aksi yang sifatnya instrumental.

Lebih lanjut dijelaskan pembagian ketiga kelompok tersebut yaitu, kelompok komunal selalu berkaitan dengan struktur sosial, yang mana perasaan atau sentimen bersama berdasar ikatan kedaerahan, loyalitas, asal usul keturunan, kekerabatan, dan kepercayaan terhadap suatu keyakinan. Nilai komunal adalah nilai bersama yang dengan mudah menggugah kesadaran orang untuk merasa, berfikir, dan bertindak bersama-sama berdasarkan dorongan hati yang berjumpa dengan dorongan hati orang lain.

2.4.3 Peranan Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan memiliki empat peranan dalam kehidupan bernegara, yaitu :

- a. Katalisasi perubahan sistem dengan cara melakukan advokasi dan berusaha membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap masalah-masalah yang penting dalam kehidupan. Melalui peran ini, kelompok kepentingan berusaha mengembangkan kemauan politik dan inisiatif masyarakat sehingga dapat bersama-sama mempengaruhi kebijakan.
- b. Monitoring atau melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melakukan kritik hingga memprotes apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum oleh pejabat negara.

- c. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Kelompok kepentingan ini kerap membela masyarakat umum yang kerap menjadi korban kekerasan dan korban ketidakadilan hukum oleh pemerintah.
- d. Mewujudkan sejumlah program dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Gaffar, 1999:204).

Dalam penyampaian kepentingan, kelompok kepentingan bisa jadi berubah menjadi kelompok penekan apabila upaya penyampaian tuntutan disampaikan secara intensif dengan cara melancarkan taktik-taktik dan tekanan politik yang luar biasa untuk mempengaruhi kebijakan, sehingga pemerintah maupun pejabat politik bersedia menyetujui tuntutan mereka (Duverger, 1984:123). Adapun taktik atau strategi gerakan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dalam menyampaikan tuntutannya melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Menyampaikan tuntutan atau aspirasi kepada partai politik
- b. Partisipasi dalam proses perumusan kebijakan
- c. Melakukan lobby dan negosiasi kepada pejabat politik
- d. Memanfaatkan hubungan pribadi dengan elit politik
- e. Penyampaian kritik dan aspirasi melalui media massa
- f. Gerakan non konvensional, yakni bentuk partisipasi politik dengan cara melakukan demonstrasi, aksi mogok, dan lain-lain.

2.4.4 Pertumbuhan dan Perkembangan Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan sesungguhnya telah lama muncul dalam kehidupan politik moderen dalam berbagai bentuk gerakan maupun organisasi kepentingan. Dalam politik di negara-negara maju seperti di Inggris di tandai dengan munculnya organisasi seperti Masyarakat Abolisi yang menentang perdagangan budak yang dibentuk di tahun 1780-an, yang kemudian diikuti organisasi-organisasi di bidang lain. Di Amerika Serikat gerakan itu ditandai dengan munculnya berbagai asosiasi dalam masyarakat yang bermaksud membela kepentingan-kepentingan kelompok, berhadapan dengan pihak Inggris maupun pertumbuhan pemerintahan Amerika pada masa-masa awal (Cigler dan Loomis 2011:8).

Dalam banyak hal kelahiran kelompok kepentingan hampir mirip dengan partai-partai politik. Hanya saja partai politik lebih diorientasikan pada upaya untuk memenangkan suara pemilih dan menduduki jabatan-jabatan dalam kekuasaan. Di Indonesia, beberapa kelompok kepentingan telah lahir mendahului partai-partai politik. Mereka bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, sebagian diantaranya malah menjadi cikal bakal partai politik. Beberapa kelompok kepentingan awal di Indonesia muncul pada era kolonial seperti Serikat Dagang Islam (SDI), Muhammadiyah, Serikat-serikat Buruh dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut sebagian bertransformasi menjadi besar dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Belakangan setelah reformasi tahun 1998 di Indonesia, gelombang kelahiran kelompok-kelompok kepentingan baru merebak secara nasional. Suasana politik yang demokratis yang ditandai dengan ledakan partisipasi mengakibatkan sebagian anggota masyarakat menyampaikan tuntutan-tuntutannya dengan menggunakan saluran-saluran baru di luar partai-partai politik dalam bentuk-bentuk kelompok kepentingan (Horowitz 2014). Selama kurang lebih 17 tahun terakhir ini di peraktikan tidak kurang 2500 an kelompok kepentingan yang lahir di seluruh tanah air, yang merangkumi berbagai aspek kehidupan, mulai dari, bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan, etnik dan lain sebagainya, dari tingkat lokal sampai nasional.

Jaminan kebebasan yang luas serta adanya kompetisi kuat diantara kelompok-kelompok kepentingan ini turut mempengaruhi konfigurasi politik serta ikut mendinamiskan prosespen pengambilan keputusan pemerintah. Meskipun demikian, hanya ebagian saja diantara kelompok-kelompok kepentingan tersebut yang mampu mewarnai atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, khususnya di tingkat nasional. Sementara sebagian kecil kelompok kepentingan yang lain dibentuk lebih merupakan tanggapan terhadap isu-isu sesaat yang muncul, adapun ada karena partai politik (Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, vol 15, no. 2, April 2016).

2.4.5 Tujuan dan Cara Mempengaruhi Pemerintah

Dalam politik di Indonesia bisa dicatat setidaknya ada beberapa tujuan dari kelompok kepentingan. *Pertama*, adalah kelompok kepentingan mempresentasikan konstituen mereka dalam mempengaruhi agenda politik. Dimana melalui lobi-lobi yang dilakukan diharapkan berdampak pada tujuan yang ingin mereka capai. *Kedua*, kelompok kepentingan memberikan peluang bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam proses politik. Minimal menyangkut satu isu tertentu, anggota-anggotanya dapat terlibat dalam mempengaruhi pejabat pemerintah. *Ketiga*, membantu mendidik individu atau masyarakat yang menjadi anggotanya untuk sadar terhadap isu-isu tertentu, sehingga memiliki sikap yang sama dengan anggotanya yang lain. *Keempat*, membantu individu untuk mengambil tindakan tertentu untuk mengambil tindakan terhadap isu-isu tertentu. *Kelima*, kelompok kepentingan dapat menjadi evaluator ataupun pengawas terhadap program-program pemerintah.

Dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, kepentingan biasanya menempuh dua langkah (Jordan and Malanoey, 2007:39-40). *Pertama*, mereka menyampaikan isu-isu yang sudah di artikulasikan sedemikian rupa untuk di beli partai-partai politik. Langkah ini biasanya ditempuh jika sistem politik yang ada berjalan secara demokratis dan terbuka, dimana partai-partai politik bersaing secara sehat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lebih tinggi ketimbang kelompok kepentingan. *Kedua*, kelompok kepentingan langsung

menyampaikan aspirasi yang sudah diartikulasikan kepada pemerintah. Proses ini biasanya didahului oleh adanya perdebatan atau polemik yang luas dalam masyarakat, khususnya melalui media massa.

Selain itu, Janda, Berry dan Goldman mengklasifikasikan cara atau strategi yang dipakai kelompok kepentingan untuk mempengaruhi pemerintah adalah :

- a. Melakukan lobbying menjalin komunikasi langsung dengan para pejabat pemerintah yang terkait, atas isu yang diperjuangkan. Wise Cummings mendefinisakan lobi sebagai *communication with legislator or other government officials to try to influence their decision* (Cummings 192:217). Kelompok-kelompok kepentingan, khususnya yang kuat, tidak jarang memiliki pelobi-pelobi khusus atau menyewa seorang pelobi profesional yang memiliki kemampuan khusus di bidang tersebut.
- b. Melalui media massa, kelompok kepentingan biasanya menggunakan media massa sebagai sarana untuk menarik sentimen serta menarik perhatian umum, sehingga pemerintah mengambil kebijakan atas isu tertentu sesuai yang diinginkan.
- c. *Grass-root pressure*, dimana kelompok kepentingan ini menggalang dukungan masyarakat lapis bawah untuk menyampaikan isu-isu tertentu.

Adakalanya kelompok kepentingan menggunakan ketiga cara diatas secara serentak dalam mempengaruhi pemerintah. Hal itu

dilakukan sebagai cara yang mungkin dipandang efektif menyangkut isu-isu tertentu terutama sekali kelompok-kelompok kepentingan dengan sumber daya yang memadai, baik materi maupun non materi. Namun demikian, keberhasilan kelompok kepentingan dalam mempengaruhi agenda pemerintah memiliki kadar yang berbeda-beda antara satu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Oleh karena, beberapa aspek yang turut menentukan pengaruh kelompok kepentingan yakni, aspek budaya, politik, struktur kelembagaan, watak dan sistem partai, watak dan gaya dalam kebijakan publik (Janda, Berry dan Goldman 1997:73).

2.4.6 Kedudukan dalam Sitem Politik

Kedudukan kelompok kepentingan dalam sistem politik adalah terletak diantara dengan masyarakat. Posisinya berada di tengah sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepentingan-kepentingan masyarakat dan pemerintah. Posisi yang strategis sebagai penghimpun, penyalur, sekaligus perumus aspirasi.

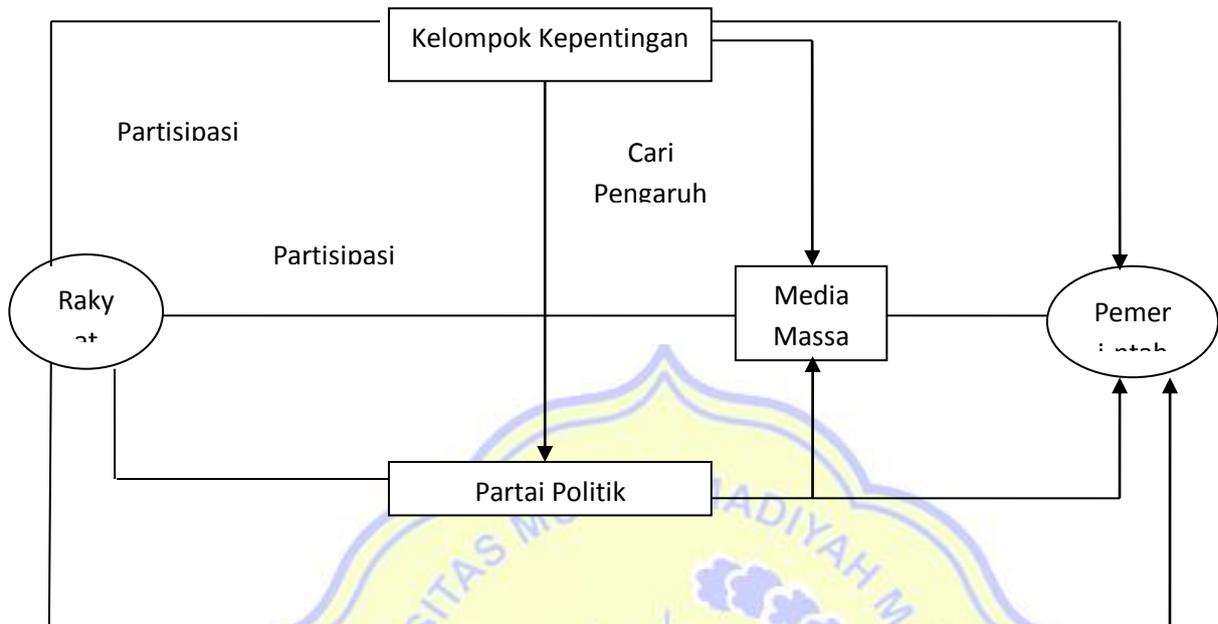
Dalam konteks sistem politik, keberadaan kelompok kepentingan ini telah melahirkan perdebatan, baik dari kubu pluralis maupun elitis. Kalangan pluralis memandang bahwa intipati dari demokrasi adalah penyebaran kekuasaan di tangan kelompok-kelompok sehingga tidak ada satupun kekuatan yang mendominasi. Setiap individu pada kenyataanya berpotensi untuk mengorganisir diri serta memiliki akses yang sama kedalam pemerintahan. Penyelenggaraan kekuasaan akan mengalami

distorsi oleh kepentingan-keentingan tertentu, jika tanpa ada keseimbangan dinamis dari unsur-unsur dalam masyarakat. Adanya kelompok kepentingan merupakan merupakan sesuatu yang baik dalam sistem politik (Hays 2011:117-118).

Kehadiran kelompok-kelompok kepentingan justru diperlukan untuk berbicara, berdebat, sekaligus didengar dan dikritik. Dengan kata lain, dimata kaum pluralis demokrasi adalah persaingan dimana masing-masing kelompok secara bebas dan setara memajukan kepentingan-kepentingannya, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Model yang paling dekat dengan ide tersebut adalah demokrasi kelompok dalam bentuk wujudnya kelompok-kelompok kepentingan. Hadirnya kelompok kepentingan justru akan memperkuat kekuatan setiap kelompok untuk saling mengimbangi.

Dalam persepektif ini, kehadiran kelompok kepentingan dipandang positif, dan diperlukan sebagai alternatif, dari model demokrasi pemilihan yang bersifat konvensional, yang di monopoli partai-partai politik. Aspirasi-aspirasi konstituen seringkali terlempar begitu pemilihan umum usai, dikalahkan agenda lain yang lebih menarik. Pemilihan umum dan partai saja tidak menjamin keseimbangan negara demokratis, adanya kelompok aktif dari berbagai jenis ukuran sangat, sangat penting agar bisa mempertahankan proses demokrasi dan agar para warga negara dapat memajukan tujuan-tujuan mereka (Hays 2011:121).

Gambar 2.1
Berikut skema kelompok kepentingan dalam kedudukan sistem politik



2.4.7 Model dan Pola Politik Kelompok kepentingan

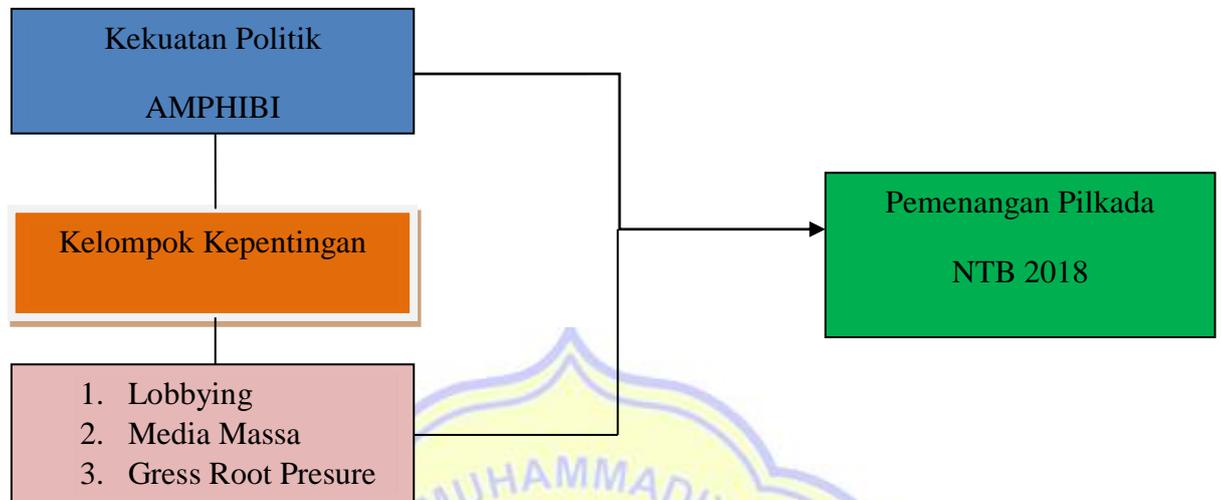
Beberapa individu dan lapisan masyarakat mempunyai kepentingan yang harus meraih dan di pertahankan untuk kelangsungan hidupnya, baik dalam kelompok masyarakat ataupun suatu bagian struktur keluarga. Dalam rangka meraih dan mempertahankan kepentingan tentu memerlukan sebuah kerja keras melalui usaha serta perjuangan yang saling bersentuhan dengan kelompok masyarakat dan individu. Untuk itu memerlukan dukungan yang kuat dari segala pihak agar dapat memperoleh respon yang baik dari kalangan masyarakat. Ragam kekuatan memiliki daya dukung kekuatan yang di dalamnya terdapat dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama .

Dalam perwujudannya peran dan pengaruh dari kelompok kepentingan berasal sepenuhnya dari faktor-faktor yang spesifik pada masing-masing sistem politik. Menurut Heywood, A. (2013) ada tiga model politik kelompok kepentingan yang paling berpengaruh yaitu :

- a. Model Pluralis, model ini memberikan gambaran paling positif tentang politik kelompok kepentingan. Mereka menekankan kemampuan dari kelompok untuk membela individu dari pengaruh pemerintah dan mempromosikan kepekaan demokratis. Tema inti dari pluralisme adalah bahwa kekuasaan politik terbagi-bagi dan tersebar secara luas.
- b. Model Korporatis, model ini berbeda dari pluralisme dimana mereka untuk menelusuri implikasi-implikasi dari hubungan-hubungan yang telah erat berkembang di masyarakat-masyarakat industri antara kelompok-kelompok dan negara. Korporatisme adalah sebuah teori sosial yang menekankan posisi istimewa yang dimiliki kelompok-kelompok tertentu dalam hubungannya dengan pemerintah, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
- c. Model Kanan Baru, model ini menunjukkan antipati terhadap kelompok-kelompok kepentingan berasal, secara ideologis, dari individualis yang terletak di jantung ekonomi neoliberal. Kelompok sosial dan badan-badan kolektif dari segala jenisnya karena itu dipandang dengan penuh kecurigaan (Heywood 2013).

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.2



(Sumber : Janda, Barry dan Goldman 1997)

2.6 Definisi Konseptual

- a. Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan.
- b. Kelompok kepentingan merupakan suatu kumpulan individu-individu ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan yang dapat dipertahankan demi terciptanya kelangsungan hidup setiap warga negara, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun negara dalam rangka mencapai dan mempertahankan sebuah kepentingan, tentu saja memerlukan sebuah usaha, kerja keras, dan sebuah perjuangan yang semuanya saling bersentuhan antar individu atau masyarakat.

c. Pada dasarnya, banyak aspek potensial tertransformasikannya menjadi kekuatan menjadi kekuatan politik sebagaimana yang dikatakan oleh Bachiar Effendy (1993 :241) yakni :

- 1) Kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik dan militer.
- 2) Kekuatan-kekuatan politik yang non formal adalah merupakan bagian dari bangunan civil society, dalam hal ini dapat dimasukkan : dunia usaha, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pemimpin agama, kalangan intelektual, lembaga-lembaga dan media massa.

d. Jenis-jenis kelompok kepentingan (Almond dan Powel 1980)

1. Kelompok anomik

Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk diantara unsur-unsur masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering tumpang tindih dengan bentuk-bentuk partisipasi non-konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan dan lain-lain.

2. Kelompok Non-asosional

Seperti kelompok anomik, kelompok ini jarang sekali yang terorganisasi secara rapi. Selain itu kegiatannya juga tidak begitu intens hanya kadangkala. Wujud dari kelompok ini adalah kelompok-kelompok keluarga atau keturunan etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, kepala keluarga atau pemimpin agama.

3. Kelompok institusional

Kelompok ini sifatnya formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain. Karena itu, organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, birokrasi dan ormas-ormas keagamaan seringkali mendukung kelompok ini atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan lobi. Sebagai kelompok formal, kelompok ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat.

4. Kelompok Asosional.

Kelompok asosional meliputi serikat buruh, kamar dagang, atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik dan lain-lain. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staf profesional yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur

2.7 Definisi Operasional

a. Lobbying

- Loby dengan elit Partai PDIP yang menjadi anggota ormas Amphibi
- Loby dengan pihak Kandidat

b. Media Massa

- Isu-isu strategis melalui media massa
- Pesan-pesan melalui media massa

c. Grass-root Presuare

- Partisipasi masyarakat



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu karya ilmiah seperti paper, makalah, lebih-lebih skripsi dan desertasi sangatlah mutlak adanya dan tidaklah berlebihan. Tanpa metodologi dalam suatu kerangka karya ilmiah akan kehilangan arah pembahasannya atau tidak mempunyai ujung pangkal serta dapatlah diragukan kadar ilmiahnya.

Penelitian yang dilakukan secara ilmiah merupakan suatu cara kerja atau metode kerja yang sistematis (dilakukan secara terencana dan cermat) untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menemukan suatu fakta dan kesimpulan yang dapat dipahami, menjelaskan, meramalakan, dan mengendalikan keadaan (Djama'an dkk, 2009 :11).

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

Menurut arikunto (2010 :5), metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah

ada sebelumnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Amphibi di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan mei sampai dengan bulan juni. Penulis memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

3.3 Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Menurut ridwan (2008 : 69) sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

N0	Narasumber	Jenis Data	Metode	Jumlah
1	Ketua AMPHIBI	Interaksi AMPHIBI dengan eksekutif dan Legislatif daerah	Wawancara	1 orang
2	Sekretaris AMPHIBI	Isu-isu yang dibangun oleh AMPHIBI melalui media massa	wawancara	1 orang
3	Anggota AMPHIBI	Interaksi anggota AMPHIBI dalam membangun loyalitas Grass-root preasure	wawancara	20 orang
4	Elite Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi anggota ormas Amphibi	Interaksi AMPHIBI dengan Elite Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wawancara	1 orang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literature, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari proser belajar mengajar (Ridwan 2008).

3.4 Pemilihan Narasumber

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang di pilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis (Djarwanto : 1998 : 34). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Umum Ormas Amphibi
2. Sekretaris Umum Ormas Amphibi
3. Anggota Amphibi
4. Elite Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi anggota ormas Amphibi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah :

- a. Teknik observasi (pengamatan)

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (ridwan, 2008 : 72).

Dari pendapat ridwan diatas dapat disimpulkan bahwa metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan

terhadap berbagai peristiwa yang berkembang di lapangan sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis agar fenomena di lokasi penelitian tidak ada yang ketinggalan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan (djamar'an satori dan aan komariah, 2009 : 47).

Dalam penelitian ini, wawancara struktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penelitian atau pengumpulan data mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dan pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan jawaban alternatif juga sudah disiapkan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah ditunjukkan untuk data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter (ridwan, 2008 : 77).

Dengan teknik ini peneliti bisa mendapatkan data-data terkait dengan data-data yang berkaitan dengan kekuatan politik ormas Amphibi

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus terus mengakibatkan data tunggal. Data yang diperoleh pada umumnya yaitu data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (sugiyono, 2013 :243). Bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara lain tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda.

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan miles dan humberman (1984) dalam sugiyono, 2013 : 246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

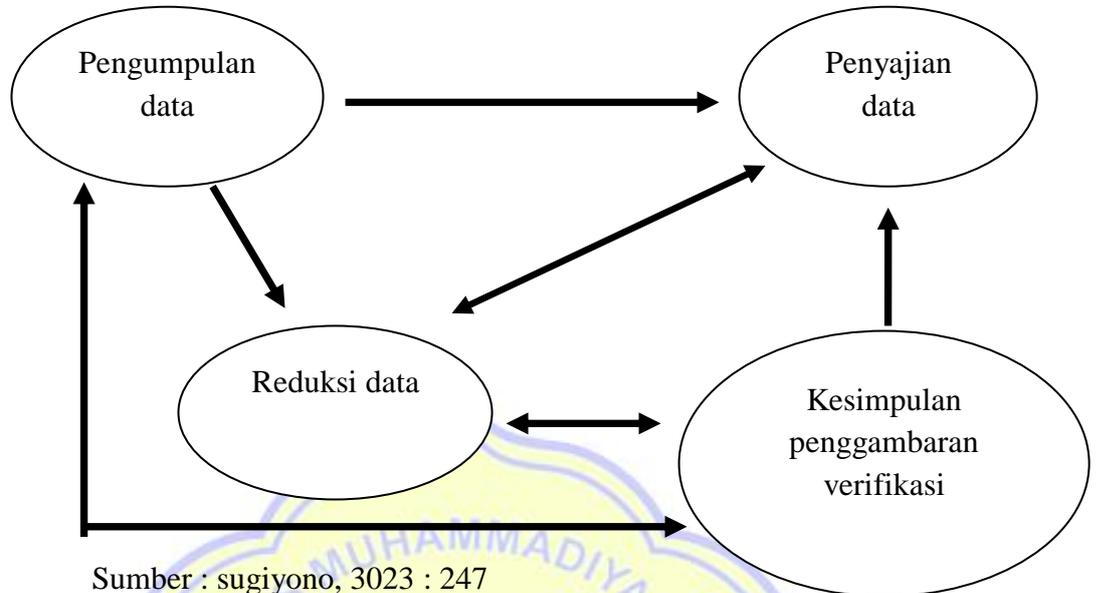
2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori diagram aliran (*flowchart*) dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*verification/conclution drowing*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada akan bukti-bukti yang kuat, yang akan mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kreadibel. Maksud dari penggunaan grafik dan kata-kata ialah memberikan suatu kesan mudah ditangkap maknanya (sugiono, 2014 : 91-99).

Untuk dapat lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan dibawah ini :



Sumber : sugiyono, 3023 : 247

